

# Prosiding Sajogyo Institute



*Agustus 2015*

## **Membaca Agenda dan Tantangan Persoalan Kemiskinan Struktural di Indonesia**

Sajogyo Institute



Judul : Membaca Agenda dan Tantangan Kemiskinan Sruktural di  
Indonesia  
Penulis : Sajogyo Institute  
Penerbit : Sajogyo Institute  
Tahun : 2015

**Layout dan desain tata letak**  
*Knowledge Management Sajogyo Institute*

*Sumber foto sampul : Dokumentasi Pribadi Sajogyo Institute*

**SAJOGYO INSTITUTE**

Sajogyo Institute adalah Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria, Kemiskinan, dan Pedesaan di Indonesia. Lembaga yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005 ini bergerak dalam produksi dan layanan pengetahuan untuk kemajuan gerakan sosial dan perbaikan kebijakan agraria, dan pembangunan pedesaan di Indonesia.



Secara historis kemiskinan, sebagai sebuah kenyataan yang menimpa kehidupan penduduk di muka bumi ini, telah berumur ribuan tahun yang lalu. Namun sejarah Kemiskinan ditinjau dari aspek wacana dapat ditelusuri dengan munculnya UU tentang Orang Miskin (*The Poor Law*) di Inggris pada tahun 1601. Sekalipun UU tersebut mengalami perubahan amandemen, dan memunculkan perdebatan seputar kemiskinan tapi orang miskin dapat dikenali dari pemberian bantuan negara terhadap orang miskin. Lebih jauh dari itu, perbincangan mengenai kemiskinan juga dapat dilacak dalam praktek kehidupan religiusitas di kalangan kaum sufi. Kehidupan fakir kaum sufi dengan menjauhkan diri dari pernik kemewahan material untuk mencapai tingkatan lebih dekat dengan penciptanya. Secara historis pula, kemiskinan seringkali berkaitan dengan beberapa persoalan. Misalnya, tesis Henry George bahwa sumber krisis berasal dari spekulasi (monopoli) tanah sehingga tanah disarankan tidak menjadi barang dagangan (*Progress and Poverty*, 1879). Persoalan demografi dan pangan berakibat pada kelaparan dan kemiskinan ditulis oleh Malthus dalam *The First Essay* (1798), dan kemiskinan muncul akibat dari persoalan struktur (Pier Smith). Dengan begitu, kemiskinan berhubungan dengan persoalan agraria dan strukturnya, dan peningkatan demografi dan minimnya pangan.

***Siapa penduduk miskin itu?*** Pertanyaan ini untuk mengenali dan mengidentifikasi penduduk miskin. Sajogyo memberi dua catatan penting yang bersifat penyelidikan ilmiah (riset) dan bersifat definitif. Pertama, sebelum menjawab berdasarkan definisi, sebaiknya kita mesti lebih dulu menemukan siapa mereka yang tergolong miskin sekali, miskin dan kecukupan itu, apa ciri-ciri mereka (dalam usaha/nafkah, dalam tingkat hidup), berapa jumlah mereka dan dimana dapat ditemukan?<sup>1</sup> Bahkan pendefinisian “miskin” perlu terlebih dulu “mendengarkan mereka”: pemberian istilah miskin pada masyarakat setempat (kurang beruntung, kurang, melarat dan lain-lain), miskin dalam hal apa, apa sebabnya dan bagaimana cara-cara mengentaskan diri menurut pandangan mereka!<sup>2</sup> Artinya sudut pandang orang miskin sendiri tidak boleh diabaikan dibandingkan pandangan orang luar. Kedua, dari segi definisi, menurut Sajogyo, “penduduk miskin adalah yang serba kurang dalam memperoleh hak azasi (“entitlement”) “bekerja dan memperoleh imbalan layak” sehingga kurang terjamin dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, lahir dan batin”.<sup>3</sup> Definisi ini bersesuaian dengan aspek-aspek dalam 8 jalur pemerataan ‘plus’ yang dibuat dan dikembangkannya. Lima jalur dari baris atas ke bawah, dan tiga jalur dari kolom kiri ke kanan, yang membentuk sebuah matrik. Delapan jalur pemerataan tersebut sebagai berikut.

---

<sup>1</sup> Sajogyo, “Memasang Rambu-Rambu dalam Mengembangkan Perekonomian Rakyat” tanggal 28 Februari 1991.

<sup>2</sup> Sayogyo, “Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia Dalam Mengentaskan Kemiskinan”, Jakarta, 1993.

<sup>3</sup> Sayogyo, “Studi Kemiskinan”, Jakarta, 3 Desember 1989.

**Matriks Delapan Jalur Pemerataan \*)**

			Jalur ke-6 (partisipasi masyarakat)	Jalur ke-7 (pemerataan antar daerah/kota/ desa)	Jalur ke-8 (kesamaan dalam hukum)
a)	Jalur ke-1:	Peluang berusaha	-----	-----	-----
b)	Jalur ke-2:	Peluang bekerja	-----	-----	-----
c)	Jalur ke-3:	Tingkat pendapatan	-----	-----	-----
d)	Jalur ke-4:	Tingkat pangan/sandang/ perumahan	-----	-----	-----
e)	Jalur ke-5:	Tingkat pendidikan/kesehatan	-----	-----	-----

\*)dari Sajogyo: *Pemerataan Di Dalam Bias Urban Pembangunan Semesta*, makalah di Seminar nasional Kualitas Manusia Dalam Pembangunan, di Palembang, 19/22 Maret 1984.

Delapan jalur di atas perlu dibaca dalam kerangka saling berkait kelindan terkait munculnya kemiskinan sekaligus upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Peluang berusaha dan bekerja menentukan tingkat pendapatan, tingkat pangan/sandang/perumahan, dan tingkat pendidikan/kesehatan. Sementara partisipasi masyarakat (terutama pemuda dan wanita); pemerataan antar daerah/kota/desa; dan kesamaan di depan hukum dimaksudkan agar mendorong keadilan dalam lima jalur sebelumnya. Pertanyaan berikutnya, apa yang menentukan peluang berusaha/bekerja? Jawaban dari pertanyaan ini berupa jalur-jalur penting sebagai “plus” (8 Jalur pemerataan plus) yaitu: (a) Penyediaan tambahan modal usaha (kredit) atau pembagian asset lahan kepada petani transmigran (sebelum 1966 redistribusi lahan dalam “landreform” masa 1960-an); (b) Upaya pemerataan pengetahuan, ketrampilan teknis, mengelola usaha dan pemasaran: lewat penyuluhan dan pelatihan; dan (c) Pemerataan teknologi lebih unggul/produktif, hasil riset (pemuliaan genetik) dan industri modern: mesin, bahan-bahan kimia dengan potensi nilai tambah lebih besar.<sup>4</sup> Dalam konteks petani perdesaan, minimnya atau semakin mengecilnya lahan yang dimiliki dan digarap dengan pelbagai faktor berakibat pada minimnya tingkat pendapatan atau ketidakcukupan pangan sehingga terjadi kemiskinan. Peluang berusaha dan bekerja bagi petani gurem dan buruh tani ketika dapat bertani pada luasan lahan yang lebih mencukupi (kebijakan “land reform” sebelum 1966 atau/dan “transmigrasi”, pelayanan kredit usaha bagi pengusaha, dan penyebaran pengetahuan dan teknologi baru.<sup>5</sup> Selain ketiga hal tersebut, aspek lain yang menentukan tingkat/corak peluang berusaha dan bekerja yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya masyarakat seperti nilai-nilai sosial, sikap, solidaritas (energi sosial), ketrampilan orang, hak-hak orang atas *perlindungan*,

<sup>4</sup> Sajogyo, *Bentuk-Bentuk Kemiskinan dan Sejumlah Indikator*, (Jakarta) 23 Juni 1993, dan Sajogyo, *Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta) 19993.

<sup>5</sup> Sajogyo, *Upaya Pemerataan dalam Pembangunan dan Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta) 12 November 1990.

dari masyarakatnya (misal: dalam mencari nafkah) mencakup *jaringan pengaman* dalam hal darurat.<sup>6</sup>

**Garis kemiskinan.** Garis kemiskinan atau garis kecukupan pangan merupakan salah satu dari buah pemikiran yang dicetuskan oleh Sajogyo. Garis kemiskinan ini untuk “mengukur kemajuan penduduk lapisan bawah (dari segi tingkat penghasilan)”.<sup>7</sup> Dengan ketekunan mengolah data statistik, maka muncul garis kemiskinan setara beras (nilai tukar) per orang/tahun. Garis kemiskinan Sajogyo terdiri atas tiga garis, dan bersifat dinamis. Tiga garis kemiskinan tersebut<sup>8</sup> yaitu melarat (“destitute”) dengan ukuran 180 kg (desa) dan 270 kg (kota); miskin sekali (“very poor”) dengan ukuran 240 kg (desa) 360 kg (kota) dan miskin (“poor”) dengan ukuran 320 kg (desa) dan 480 kg (kota). Pada tahun 1979, terjadi perubahan bahwa garis kemiskinan melarat tidak digunakan lagi, dan ditambah dengan garis “Nyaris Miskin” dengan ukuran 480 kg (desa) dan 720 kg (kota). Berdasarkan analisa Hutabarat (1979) atas data SUSENAS 1976, ukuran 180 kg (desa) dan 270 kg (kota) (“tidak cukup makan”) bertepatan dengan garis 1700 kalori/orang-hari sementara patokan anjuran sebesar 1900 kalori.

Garis kemiskinan Sajogyo muncul dalam pelbagai garis kemiskinan yang lain di antaranya dari Polii (Hasanuddin), Hendra Esmara (Andalas), Biro Pusat Statistik dan Bank Dunia. Menurutnya, garis kemiskinan yang dianggap unggul ketika diangkat dari teori ekonomi makro dengan kelebihan dapat menghitung sistem “ekonomi nasional” sehingga perlu dilimpahkan pada lapisan miskin. Sementara itu, penggunaan pemikiran mikro (keperluan rumah tangga atau pengusaha dalam hal upah minimum) hanya terkesan “mengumbar harapan” tanpa ada gambaran pencapaiannya. Tidak hanya menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin di sekitar garis kemiskinan, garis kemiskinan ini justru berupaya menyoroti tiga hal pokok sekaligus yaitu keberadaan lapisan bawah/golongan lemah (20%-40%), persoalan pangan dan persoalan tanah. Di perdesaan, lapisan bawah/golongan lemah tidak memiliki lahan yang luas (petani gurem/tak bertanah) untuk ditanami sehingga berdampak pada ketidakcukupan pangan mereka.

**Riwayat Studi kemiskinan.** Perhatian Sajogyo terhadap persoalan kemiskinan ditempa melalui kunjungan-dan-tinggal di lapang terutama ketika menjadi asisten dosen di kampus. Misalnya, di daerah Lembang, Kabupaten Bandung sebagai pusat pertanian sayuran kentang, terdapat kejadian mencolok yaitu ketimpangan besar dalam pemilihan tanah (petani sempit dan petani luas bermodal). Ketimpangan itu berasal dari warisan sejarah pembentukan desa terkait kewajiban tanam kopi oleh pemerintah saat itu. Di tempat lain seperti Sumatera Utara (sekitar Medan) dan di Sumatera Selatan (khususnya Lampung) ketika menjadi asisten lapang K.J. Pelzer (Universitas Yale, Amerika), terdapat masing-masing masalah yaitu perebutan tanah perkebunan besar oleh petani kecil, dan pembagian tanah dalam gejala “transmigrasi Spontan”. Bila merujuk pada kunjungan-

---

<sup>6</sup> Sajogyo, *Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan*.

<sup>7</sup> Sajogyo, *Garis Kemiskinan dan Ukuran Tingkat Kesejahteraan Penduduk*, IPB, Bogor, 10-11 Februari 1988.

<sup>8</sup> Pemakaian ukuran “nilai tukar kilogram beras per kapita” mengikuti patokan sebagian ekonom seperti E. de Vries, memakai kg beras/kapita (dikutip oleh Clark/Hasswell). Ukuran tersebut dapat berguna sebagai indeks penyesuaian inflasi rupiah; pilihan beras karena merupakan pos pengeluaran makanan yang dominan bagi sebagian besar penduduk, dalam Sajogyo, *Studi Kemiskinan*, Jakarta, 3 Desember 1989.

dan-tinggal di lapang dari tiga lokasi ini, studi kemiskinan bersinggungan dengan persoalan ketimpangan struktur agraria (tanah), migrasi, dan warisan sejarah pemerintah kolonial.

Menekuni studi kemiskinan dan upaya mengatasi persoalan kemiskinan, dengan penuh selidik dan kehati-hatian, Sajogyo mengingatkan bahwa:

“Dalam mempersoalkan masalah “kemiskinan” (lahir dan batin), yang kita harap dapat teratasi dalam proses pembangunan semesta sejak merdeka, aspek ideologi dan upaya menemukan format struktural dan budaya yang pas, merupakan hal-hal yang strategis. Cita-cita “adil dan makmur” mengisyaratkan bahwa makmur yang dicapai bersama adil yang akan mengatasi kemiskinan! Sebaliknya, cita-cita “tak makmur asal adil” jika pernah terwujud ingin kita tinggalkan!”<sup>9</sup>

Dengan begitu dalam pembangunan diharapkan kemiskinan menjadi pijakan dasar untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pembangunan agar kemiskinan teratasi. Bukan sebaliknya, program-program pembangunan justru melahirkan dan melanggengkan kemiskinan. Oleh karena itu, keberadaan ideologi, format struktural dan kultural menjadi aspek strategis untuk ditelusuri dalam setiap kebijakan pembangunan, dan untuk mengatasi kemiskinan. Payung “pembangunan” yang dibawa dan diperkenalkan seringkali datang dengan dalil melindungi dan mensejahterakan. Payung “pembangunan” dengan variasi istilah dan bermacam gambaran yang memukau menjadi penting dilacak akar ideologinya agar salah satu persoalan kemiskinan di tingkat konseptual dapat diatasi. Jika kemiskinan dianggap residu dari pembangunan, dan kebijakan pembangunan justru menimbulkan kemiskinan, selanjutnya warna ideologi, dan format struktural dan budaya yang pas seperti apa yang ditawarkan untuk mengatasi kemiskinan?

-----oo0oo-----

Di Indonesia, studi tentang kemiskinan juga tidak dapat dilepaskan dengan persoalan agraria. Dengan terbitnya dan diberlakukannya *Agrarische Wet 1870*, penguasaan sumber-sumber agraria oleh kolonial Belanda berakibat pada penurunan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Turunnya tingkat kesejahteraan rakyat tersebut selanjutnya memunculkan politik etis setelah sebelumnya terjadi tuntutan untuk memperbaiki tingkat kemakmuran rakyat. Politik etis berisi enam program diantaranya irigasi, pendidikan dan transmigrasi. Kajian sosiologi lebih khusus tentang kaitan transmigrasi dan kemiskinan oleh Sajogyo mengungkapkan bahwa transmigrasi sebagai perpindahan kemiskinan. Begitu pula dalam kajian antropologi oleh Clifford Geertz terdapat involusi pertanian yang menyebabkan munculnya kemiskinan bersama (*Involusi Pertanian*, 1983). Terkait kemiskinan, Bulkin dengan pendekatan politik mencatat adanya “kemiskinan politik” (ketidakberdayaan politik suatu golongan/masyarakat) akibat dari proses depolitisasi. Sejak 1969 struktur kekuasaan Indonesia telah mendasarkan diri pada organisasi dan struktur kekuatan negara (negara pejabat/pengawal). Dengan pendekatan ekonomi, Nasution menjelaskan ragam mekanisme yang melahirkan dan mempertahankan kemiskinan yaitu akumulasi modal yang tergantung dari pusat di luar, nilai tukar ekonomi terhadap dunia cenderung asimetris, struktur kesempatan kerja dan organisasi produksi yang tak seimbang struktur angkatan kerja, serta diikuti hubungan antara desa (pihak lemah) dan kota,

---

<sup>9</sup> Sajogyo, Studi Kemiskinan, Jakarta, 3 Desember 1989.



pusat yang lebih kuat. Kleden menjelaskan adanya “kemiskinan budaya” (cultural poverty). Perubahan budaya digambarkan berjalan dari satu lapis ke lapis lainnya dari tiga lapis (mental-kognitif, sosial dan material) dan sebaliknya, dalam sistem sosial-budaya, sementara kemiskinan muncul karena terputusnya hubungan di antara ketiga lapis tersebut.<sup>10</sup>

Mengenai ukuran kemiskinan, pada tahun 1984 kajian statistik melalui Biro Pusat Statistik merilis jumlah kemiskinan pertama kali dengan menggunakan garis kemiskinan. Menurut BPS, tidak tercukupinya kebutuhan pangan (2100 kalori/hari) dan non pangan disebut orang miskin. Ukuran lain yang lebih praktis untuk menghitung kemiskinan yaitu Kebutuhan Fisik Minimum atau sekarang disebut dengan Upah Minimum bagi pekerja.

Melalui selang pandang tinjauan historis tersebut menunjukkan bahwa studi tentang kemiskinan tidak hanya mono disiplin tapi dapat dipahami secara multi disiplin. Studi tentang kemiskinan bukan menjadi fokus dari sebuah disiplin ilmu tertentu. Dengan sifat multi disiplin dari studi tentang kemiskinan menyebabkan studi ini selalu beririsan dan bertalian erat dengan disiplin ilmu yang lain di antaranya sosiologi, antropologi, ekonomi, demografi dan politik. Muti disiplin dalam menjelaskan kemiskinan sebagai sebuah ragam pendekatan dan perspektif tidak hanya dipergunakan membedah persoalan kemiskinan secara teoritis tapi dapat pula secara bersama-sama menanggulangnya secara praksis. Namun barangkali karena studi tentang kemiskinan bersifat multi disiplin berakibat pula pada keanekaragaman pandangan teoritis dan penanganan praksis yang lebih menonjolkan sekat perbedaan sehingga persoalan kemiskinan tidak terfokus, dan tidak terselesaikan (?).

Sementara itu jika menguraikan tentang kemiskinan, selama ini kemiskinan berasal dari tiga akibat yaitu struktural, kultural, dan *environment (resources)*. Kemiskinan struktural terjadi berasal dari sebuah struktur ekonomi dan struktur kelembagaan ekonomi yang menyulitkan seseorang untuk memperoleh pendapatan yang layak. Dalam kemiskinan struktural, orang miskin relatif bersifat dinamis, dapat keluar-masuk garis kemiskinan. Pandangan struktural menyebutkan bahwa kemiskinan lahir dari proses kebijakan. Dari segi kultural, kemiskinan diakibatkan oleh ketiadaan keterampilan dan pengetahuan terutama kemalasan individu. Kemiskinan kultural dapat ditandai bahwa karena orang miskin dianggap malas maka orang miskin tidak berganti-ganti orang. Minimnya sumberdaya alam untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka mendapatkan pendapatan yang cukup juga menyebabkan kemiskinan *environment*. Dari ketiga kemiskinan tersebut, dua penjelasan kemiskinan terakhir cenderung menyalahkan orang miskin, dan terlalu bergantung pada sumberdaya alam. Perspektif ekonomi politik beranggapan bahwa penjelasan struktural lebih mendasar dalam menerangkan penyebab kemiskinan ketimbang kultural dan *environment*.

Pandangan kemiskinan struktural merujuk pada adanya hambatan-hambatan struktural yang seringkali diciptakan dan dilanggengkan oleh pihak status quo melalui pengaruh

---

<sup>10</sup> Diringkas oleh Sajogyo, Studi Kemiskinan, Jakarta, 3 Desember 1989. Lihat lebih lanjut, Farchan Bulkin: Kemiskinan dalam studi politik Indonesia di “Studi kemiskinan di Indonesia”, Seri III, Transformasi, Jakarta, Yayasan API/Forum Ilmu Sosial Transformasi, Jakarta, 1988; Darman Nasution: Struktur dan mekanisme kemiskinan di Indonesia, di “Studi kemiskinan di Indonesia”, Seri III, Transformasi, Jakarta, Yayasan API/Forum Ilmu Sosial Transformasi, Jakarta, 1988; Ignas Kleden: Masalah kemiskinan sosial-budaya di Indonesia, di Prisma, th 16, no.: 8, 1987, 15-28.

yang dimilikinya. Kebijakan dan aturan dibuat untuk mempertahankan pengaruh pihak status quo. Kemiskinan bersifat struktural jika dilanggengkan secara terus-menerus dapat berubah menjadi kultural. Misalnya, stigmatisasi (seperti PKI atau komunis), ideologisasi, pendekatan stabilitas yang dikembangkan oleh struktur rezim Orde Baru telah menyatu menjadi kultur. Ketiganya menjadi musabab munculnya dan langgengnya kemiskinan di Indonesia. Perbedaan pendapat atau sikap dengan pihak pemerintah atau lawan ditanggapi dengan cara memberi cap/stigmatisasi. Kemiskinan struktural dapat ditandai dari kebijakan pembangunan yang menelantarkan orang miskin, pertumbuhan yang tidak sensitif pemerataan dan kemiskinan, rendahnya representasi dan partisipasi aktif orang miskin dalam pengambilan keputusan/kebijakan.

Agar kemiskinan struktural tidak kehilangan latar, argumentasi dan ruang lingkungannya, maka kemiskinan struktural harus diletakkan dan dipahami pada konteks mikro, meso dan makro. Setidaknya, membaca persoalan kemiskinan dalam ketiga konteks tersebut membantu memudahkan pemetaan kemiskinan, mempertajam analisis tiap konteks serta keterhubungannya. Begitu pula konteks kemiskinan membantu menemukan cara-cara dan pilihan-pilihan strategi sebagai pijakan yang diambil untuk digunakan ke depan. Studi tentang kemiskinan struktural dalam konteks mikro menganalisis seputar hubungan patron-klien, persoalan identifikasi penduduk miskin, ciri-ciri kemiskinan; dan ukuran-ukuran tingkat kemiskinan di tingkat lokal. Di Indonesia, jumlah kemiskinan bersifat fluktuatif karena terlalu banyak rakyat miskin yang berada di garis kemiskinan, dan sangat sensitif oleh fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok. Secara statistik jumlah kemiskinan dapat ditekan melalui sebuah perlakuan. Misalnya, garis kemiskinan diletakkan secara konsisten, dan harga pangan ditekan agar tidak merangkak naik sementara bantuan (seperti Bantuan Tunai Langsung) diberikan terhadap orang miskin sesaat sebelum survei kemiskinan dilakukan. Dengan cara begitu, jumlah kemiskinan relatif tidak naik bahkan dapat turun. Riset kemiskinan dalam konteks mikro dapat dilakukan dengan mengenali penduduk atau keluarga miskin (seperti jenis pekerjaan, lokasi geografis-spasial, lingkungan fisik dan budayanya), ciri-ciri dan ukuran kemiskinan (menurut masyarakat setempat dan peneliti) serta masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga miskin.

Pada tingkat meso, persoalan kemiskinan struktural muncul disebabkan oleh rendahnya representasi kaum miskin atau organisasi yang berafiliasi dengan kaum miskin yang menyuarakan kepentingan orang miskin. Begitu pula rendahnya tingkat partisipasi kaum miskin sehingga tidak mampu mempengaruhi sebuah pengambilan keputusan/kebijakan baik berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kaum miskin. Misalnya, rendahnya partisipasi orang miskin berpengaruh terhadap minimnya akses dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya agraria. Selain representasi dan partisipasi, minimnya sensitivitas kemiskinan dan pemerataan dalam kerja-kerja organisasi atau lembaga.

Dilihat dari konteks makro, kemiskinan struktural perlu dibaca melalui bekerjanya sistem ekonomi dan sistem politik yang dikembangkan. Sistem ekonomi dan kelembaannya ditata dengan mengedepankan pertumbuhan (efisiensi) tapi menelantarkan kemiskinan. Pertanyaan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu: siapa pembuat, siapa penerima dan sejauhmana terdistribusi dengan merata. Seberapa jauh dampak pembangunan seperti infrastruktur jalan bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi *gap* antara kaum kaya dan kaum miskin di suatu daerah. Sistem politik yang dibangun seperti pembagian daerah pemilihan (dapil) berakibat pada jumlah wakil rakyat dan wakil

daerah lebih banyak berasal dari wilayah yang padat penduduk. Dapil dengan wilayah yang relatif tidak padat penduduknya tidak mampu menyuarakan aspirasi kaum miskin dan daerah miskin. Dalam perpektif ekonomi politik, pembangunan di Indonesia mengidap *colonial mode of development* sehingga membentuk dan menyuburkan pemiskinan itu sendiri. Dalam model pembangunan kapitalis tersebut, kemiskinan dianggap sebuah residu dalam pembangunan, bukan meletakkan kemiskinan sebagai pusat pembangunan.

Setelah tidak ada perang, perdagangan (trade) dengan kesepakatan-kesepakatan menyertainya merupakan jalan yang legal dalam menyebarkan pengaruh dan melakukan pemaksaan. Trade bisa menjadi penyaluran kepentingan di suatu negara. Saat ini tanpa disadari bahwa sistem perdagangan dan pembangunan semakin canggih yang berkelindan dengan penciptaan kemiskinan. Pihak yang bertanggung jawab ketika sistem perdagangan dan pembangunan berkelindan dengan munculnya kemiskinan adalah negara yang bersangkutan karena persoalan kemiskinan adalah persoalan politik. Sebab ekonomi merupakan upaya politik dalam mensejahterakan rakyat suatu negara. Jika terjadi ketimpangan spasial sebagai bentuk ketimpangan sosial-ekonomi menunjukkan adanya (politik) pembangunan yang masih menekankan pertumbuhan dan efisiensi minus pemerataan. Untuk itu perlu ukuran-ukuran kemiskinan struktural secara substantif dalam konteks ini.

Dalam kasus keberanian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari desa untuk bekerja di luar negeri menunjukkan tidak adanya lagi kemiskinan kultural. Justru struktur yang timpang terjadi di daerah pedesaan sehingga menjadi salah satu pendorong untuk bekerja di luar negeri. Kendala struktural lain yang dihadapi yang mendorong kemiskinan berupa kurangnya ketersediaan informasi yang transparan dan akurat. Bila tidak cukup informasi mengenai pekerjaan di luar negeri, maka berpotensi terperangkap dalam jaringan perdagangan manusia atau penyiksaan. Feminisasi kemiskinan perempuan menunjukkan adanya persoalan ketimpangan struktural. Misalnya, masalah tingkat upah, tingkat pendidikan dan kesehatan merupakan masalah struktural yang dihadapi oleh kaum perempuan. Dalam pengentasan kemiskinan struktural secara spasial, desa merupakan wilayah strategis untuk mendorong pemerataan dan keadilan. Memahami dinamika politik dan kebijakan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dimulai dari wilayah desa.

Agar kemiskinan struktural tidak kehilangan latar, argumentasi dan ruang lingkungannya, maka kemiskinan struktural harus diletakkan dan dipahami pada konteks mikro, meso dan makro. Setidaknya, membaca persoalan kemiskinan dalam ketiga konteks tersebut membantu memudahkan pemetaan kemiskinan, mempertajam analisis tiap konteks serta keterhubungannya. Begitu pula konteks kemiskinan membantu menemukan cara-cara dan pilihan-pilihan strategi sebagai pijakan yang diambil untuk digunakan ke depan. Studi tentang kemiskinan struktural dalam konteks mikro menganalisis seputar hubungan patron-klien, persoalan identifikasi penduduk miskin, ciri-ciri kemiskinan; dan ukuran-ukuran tingkat kemiskinan di tingkat lokal. Di Indonesia, jumlah kemiskinan bersifat fluktuatif karena terlalu banyak rakyat miskin yang berada di garis kemiskinan, dan sangat sensitif oleh fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok. Secara statistik jumlah kemiskinan dapat ditekan melalui sebuah perlakuan.